

**HAMBATAN TIMOR LESTE MENDAPATKAN STATUS
KEANGGOTAAN PENUH ASEAN**

RESUME



Oleh:

Ibnu Mashud Alkatiri

151 080 219

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL " VETERAN "**
YOGYAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan Judul

Pada dasarnya tujuan utama suatu negara melakukan hubungan internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerja sama untuk mempertemukan kepentingan nasional antarnegara.

Keinginan pemerintah Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN didasarkan pada kebijakan luar negeri pemerintah Timor Leste serta letak geografis yang berdekatan antara ASEAN dan Timor Leste. Hal tersebut didasarkan pula dengan prinsip-prinsip diplomasi Timor Leste, yakni aktif menjalin kerja sama dengan ASEAN, dan berupaya untuk menjadi anggota ASEAN. Upaya untuk bergabung bersama ASEAN dilakukan secara bertahap oleh Timor Leste. Saat ini, Timor Leste mendapatkan status pemerhati (*observer*) dalam ASEAN.

Peresmian Sekretariat ASEAN di Dili merupakan penanda penting dalam perjalanan menuju bergabungnya Timor Leste dalam ASEAN. Keberadaan sekretariat ASEAN di Dili membuat langkah-langkah menuju target itu menjadi lebih konkrit. Keseriusan pemerintah Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN dapat dilihat dari pernyataan resminya.

Alasan penulis memilih judul tentang hambatan Timor Leste bergabung dalam ASEAN karena letak geografis Timor Leste yang berada di Asia Tenggara dan merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum bergabung dalam organisasi regional ASEAN. Sekaligus berupaya untuk mengulas tentang apa yang sebenarnya menjadi hambatan keanggotaan Timor Leste bersama ASEAN. Alasan lainnya karena tema ini sesuai dengan kajian studi yang penulis pelajari serta masih *up to date* sebagai isu dalam hubungan internasional yang sangat relevan sebagai karya penelitian. Karena ketertarikan penulis terhadap fenomena tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini diberi judul "Hambatan Timor Leste Mendapatkan Status Keanggotaan Penuh ASEAN".

B. Latar belakang Masalah

Jajak pendapat yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) telah menghantarkan wilayah Timor Leste memasuki babakan sejarah baru. Setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh *UNTAET (United Nation Transition in East Timor)* kepada pemerintah baru Timor Leste pada 20 Mei 2002, rakyat Timor Leste menyelenggarakan pemerintahan sebagai negara yang merdeka. Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara berdaulat, dengan sebutan resmi *Republica Democratica de Timor Leste* (RDTL). Sebagai sebuah negara yang baru, tentunya Timor Leste membutuhkan kerjasama dengan negara lain khususnya dengan negara-negara tetangganya untuk memajukan pembangunan dalam negeri dan memenuhi kepentingan nasional Timor Leste.

Dalam sejarah negara bangsa, tidak dipungkiri bahwa RDTL sebagai sebuah negara baru menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang hampir tidak dapat dihindarkan dalam masa transisinya. Menyadari keterbatasan yang dihadapi dengan berbagai permasalahan internal yang menimpa Timor Leste dan ada ketakutan

dari pihak Timor Leste terhadap intervensi asing yang mengancam mereka sebagai negara yang berdaulat, Timor Leste berupaya untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi negerinya yang kecil dari negara-negara besar di sekelilingnya, termasuk Australia. Timor leste menyadari akan kemampuan dan kualitas bangsanya yang masih sangat terbatas, tentunya Timor Leste menyadari pentingnya mengambil bagian dalam organisasi regional bersama ASEAN.

Terkait keinginan Timor Leste bergabung dengan ASEAN, Sekretariat Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengatakan tidak ada penolakan dari negara-negara anggota ASEAN. Hanya saja, belum ada kecocokan waktu dan kesiapan dari kedua belah pihak. Namun, di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Gerakan Nonblok di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan bahwa, mayoritas negara anggota ASEAN sudah menyetujui bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ke-11 perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara tersebut. Namun, masih ada satu negara anggota ASEAN yang keberatan, tanpa bersedia menyebutkan nama negara tersebut.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas dan upaya diplomasi pemerintah Timor Leste untuk bergabung dalam keanggotaan ASEAN, tentu saja bukanlah hal mudah. Sementara itu, berdasarkan Piagam ASEAN pasal 6, ayat 3, menyatakan Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus diantara negara anggota oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi Timor Leste, terkait keinginannya untuk mendapatkan status keanggotaan penuh ASEAN.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah *Faktor Apa yang menjadi hambatan keanggotaan Timor Leste di ASEAN?*

D. Kerangka Pemikiran

Kerjasama Regional

Dalam studi Hubungan Internasional, regionalisme (*Regionalism*) memiliki irisan studi yang sangat erat dengan 'Studi Kawasan (*Area Studies*)'. Oleh karena itu, definisi tentang regionalisme akan banyak mengambil

dari definisi-definisi yang berkembang dalam studi kawasan. Untuk memahami kerja sama kawasan sebaiknya harus memahami definisi dari kawasan dan regionalisme yang sering menjadi perdebatan. Regionalisme dapat didefinisikan sebagai tingkat kohesivitas sosial (etnisitas, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, dan kesadaran terhadap sebuah warisan bersama), kohesivitas politik (tipe rezim, ideologi), kohesivitas organisasi (ekstensi lembaga-lembaga regional). Semakin intens hubungan negara tersebut, semakin tinggi pula tingkat kohesivitas yang dihasilkan.

Menurut Mansbaach, *region* atau kawasan adalah "Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional". Menurut Coumbis dan Wolfe, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations, Power and Justice*, terdapat empat kriteria untuk mendefinisikan sebuah kawasan atau region. Kriteria tersebut adalah:

1. Kriteria geografis: Mengelompokan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua,

kepulauan dan sebagainya seperti Eropa dan Asia.

2. Kriteria politik/militer: Mengelompokan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.
3. Kriteria ekonomi: Mengelompokan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti, GNP, dan output industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau terbelakang.
4. Kriteria Transaksional: Mengelompokan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat pada wilayah Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Kemudian, Menurut Bruce Russett, kriteria suatu region atau kawasan, Yaitu:

1. Adanya kemiripan sosiokultural;

2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip, yang biasanya tercermin pada *voting* dalam sidang-sidang PBB;
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi supranasional atau antar pemerintah;
4. Interdependensi ekonomi, yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional; dan
5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara-negara tersebut.

Regionalisme menjadi studi yang penting bagi studi hubungan internasional, ketika pada kenyataannya, suatu permasalahan global tetap memerlukan penanganan dalam ruang lingkup kerja sama yang lebih kecil, yakni dalam tataran regional. ASEAN sebagai suatu bentuk kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara merupakan salah satu bagian dari regionalisme yang hadir untuk menjawab tantangan global. Berangkat dari uraian teori di atas sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antara Timor Leste dan kerjasama regional di Asia Tenggara (ASEAN) dalam penulisan ini.

Sebagai negara baru, Timor Leste menghadapi berbagai tantangan internal dalam pembangunannya. Aspek

sosial, ekonomi, politik, keamanan dan penegakan hukum di Timor Leste masih menjadi pekerjaan rumah sebagai negara baru. Selama 5 tahun pertama kemerdekaan, Timor-Leste masih menghadapi berbagai "*turbulensi*" secara terus menerus dan capaian pembangunan dapat dikatakan relatif rendah, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan berbagai gangguan keamanan akibat konflik horisontal.

E. ARGUMEN POKOK

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan penentuan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis memberikan jawaban sementara bahwa Timor Leste sebagai negara baru masih dihadapkan pada berbagai masalah dalam negerinya, seperti pendapatan negara dari minyak bumi dan gas menjadi sumber utama pembiayaan belanja Pemerintah Timor-Leste, permasalahan kemiskinan, finansial, keterbatasan sumber daya manusia dan masih adanya gangguan akibat konflik horisontal. Terkait berbagai persoalan tersebut di atas, tentunya Timor Leste akan menghadapi tantangan yaitu terkait pengakuannya (konsensus) oleh ASEAN, yang merujuk pada Piagam ASEAN, Pasal 6, Ayat 3, menyatakan bahwa penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara

konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.

Oleh sebab itu, hambatan keanggotaan Timor Leste di ASEAN disebabkan oleh instabilitas politik keamanan serta persoalan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste.

F. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja sehingga Timor Leste belum mendapatkan status keanggotaan penuh ASEAN.

G. BATASAN PENELITIAN

Dalam upaya memfokuskan permasalahan dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis memberikan batasan penelitian yaitu dimulai dari perayaan kemerdekaan (pengakuan internasional) terhadap Timor Leste tahun 2002 sampai tahun 2011.

BAB II

PERLUASAN ANGGOTA DAN KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG DENGAN ASEAN

A. Perluasan Anggota ASEAN

Deklarasi Bangkok yang dicetuskan pada tanggal 8 Agustus 1967 merupakan dasar berdirinya organisasi *Association of South East Asian Nations* atau ASEAN.

Sejak ASEAN berdiri pada tahun 1967, sudah dinyatakan bahwa perhimpunan ASEAN terbuka bagi partisipasi seluruh negara di wilayah Asia Tenggara untuk menjadi anggota ASEAN dengan persyaratan bahwa negara tersebut dapat menghormati cita-cita, prinsip, dan tujuan ASEAN sebagaimana yang tertuang dalam setiap deklarasi dan keputusan-keputusan bersama ASEAN. Berdasarkan ketentuan dalam Piagam ASEAN Pasal 6 mengenai Penerimaan Anggota Baru, menyebutkan bahwa syarat menjadi anggota baru ASEAN adalah:

1. Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN.
2. Penerimaan keanggotaan wajib didasarkan atas kriteria berikut:
 - (a) Letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara;
 - (b) Pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN;
 - (c) Kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam; dan
 - (d) Kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.

3. Penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN.

4. Negara pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan Instrumen Akses Piagam.

Dalam perjalanan waktu, jumlah anggota ASEAN pun bertambah dari yang semula hanya lima anggota pada saat didirikannya, menjadi sepuluh ketika Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) serta Cambodia (1999). Pada satu sisi, masuknya Kamboja secara resmi pada tahun 1999 merupakan suatu prestasi yang patut dicatat sebagai keberhasilan puncak ASEAN di bidang kerjasam politik. ASEAN telah berhasil memenuhi setengah bagian dari keinginan awal para pendirinya. Bergabungnya lima anggota tambahan ini, praktis hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara telah bergabung ke dalam ASEAN. Akan tetapi, keputusan rakyat Timor Leste untuk berpisah dari Indonesia melalui jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, tentu berhak mengajukan keanggotaanya.

Mengacu pada syarat-syarat dalam Piagam ASEAN pasal 6, Timor Leste tentu saja telah memenuhi beberapa

kriteria. Dalam hal geografis, Timor Leste berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, Timor Leste juga memiliki hubungan dengan kedutaan besar di 10 negara anggota ASEAN dan menandatangani TAC, berarti menunjukkan bahwa pada dasarnya mengerti prinsip-prinsip dan tujuan dasar ASEAN. Penandatanganan TAC mengindikasikan bahwa Timor Leste memahami dan mematuhi untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara anggota ASEAN. Namun demikian, Timor Leste masih dihadapkan pada permasalahan problematis terkait konsensus diantara Sepuluh negara anggota ASEAN terhadap pemberian pengakuannya.

B. Keinginan Timor Leste Bergabung dengan ASEAN

Timor Leste resmi merdeka pada 20 Mei 2002. Sebelumnya, wilayah negara tersebut merupakan wilayah Provinsi Timor Timur, provinsi ke-27 Republik Indonesia. Timor Timur melepaskan diri dari RI setelah penentuan pendapat 1999. Sembilan tahun setelah kemerdekaan Timor Leste, keinginan untuk menjadi bagian dari anggota ASEAN ke-11 semakin mendekati kenyataan ketika Pemerintah Timor Leste secara resmi mengajukan permohonan menjadi anggota ASEAN ditandai dengan penyerahan aplikasi formal kepada pemerintah Indonesia

pada tanggal 04 Maret 2011. Selanjutnya, pada KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, Mei 2011, barulah secara resmi Timor Leste melengkapi permohonan keanggotaan kepada Sepuluh negara anggota ASEAN.

Mencermati dinamika organisasi regional ASEAN yang terus mengalami perkembangan yang signifikan pada tataran regional dan internasional, menunjukkan kerjasama ASEAN semakin solid dan dinamis. Terciptanya perdamaian dan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terus mengalami peningkatan, merupakan kesempatan bagi Timor Leste untuk menjadi bagian dari keanggotaannya di ASEAN. Perkembangan positif ASEAN tersebut, menjadikan ASEAN sebagai masa depan Timor Leste, dimana Timor Leste berharap dengan bergabungnya di ASEAN akan memenuhi kepentingan nasionalnya dan memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan Timor Leste.

Keinginan Pemerintah Timor Leste untuk bergabung di ASEAN dapat dilihat dari pernyataan resminya. Menurut Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, menyatakan:

"Dengan bergabungnya Timor Leste ke dalam Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), bisa mendorong ekonomi negara ini untuk tumbuh

dan berkembang menjadi lebih baik daripada saat ini. Apalagi, kerja sama ASEAN tidak hanya bidang sosial, budaya, teknik, pendidikan, tetapi juga ekonomi, dan lainnya. Selain itu, ASEAN juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui rasa hormat untuk keadilan dan taat aturan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."

1. Kebijakan Luar Negeri Timor Leste

Fokus utama Pemerintah Timor Leste dalam hubungan internasional adalah membangun jalinan kerjasama dan persahabatan yang erat dengan negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Australia, disamping dengan Portugal sebagai negara yang memiliki ikatan sejarah dan budaya. Secara lebih luas RDTL berkeinginan kuat untuk menjalin hubungan dengan negara-negara kawasan khususnya dengan negara-negara ASEAN, negara-negara Pasifik Selatan, serta berusaha menampilkan eksistensinya dalam forum global, PBB.

Politik luar negeri Timor Leste yang pragmatis, bertetangga baik dan bersahabat, serta aktif membina hubungan kerja sama dengan negara-negara di dunia telah menghantarkan Timor Leste melalui sidang Majelis Umum PBB ke-57 menerima Republik Demokratis Timor Leste (RDTL) sebagai anggota ke-191 PBB, pada tanggal 27 September tahun 2002.

Terkait keinginan Timor Leste di ASEAN dapat dilihat dari target diplomasi Timor Leste, yang salah satu butirnya yang ke-5 menyatakan "Aktif menjalin kerjasama dengan ASEAN, dan berusaha untuk menjadi anggota ASEAN". Jalinan kerjasama dan hubungan luar negeri ini di pertegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Demokratis Timor Leste, Pasal 8, ayat 2 dan 4 dengan jelas menyatakan posisi kebijakan luar negeri Timor Leste. Pasal 2, menerangkan:

"Republik Demokratis Timor Leste akan membangun hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa lain, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, perlucutan senjata yang umum, serentak dan teratur, penciptaan suatu sistem pengamanan bersama serta penciptaan suatu orde ekonomi internasional yang baru, yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan dalam hubungan antarbangsa".

Sementara itu, ayat 4 menyatakan: *"Republik Demokratis Timor Leste akan menjalin ikatan persahabatan dan kerja sama khusus dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara sekawasan".*

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa suatu orientasi dari politik luar negeri Timor Leste dalam kerangka kerjasama regionalnya bersama ASEAN.

2. Upaya Timor Leste Menjadi Anggota ASEAN

Sejak Timor Leste mendapatkan pengakuan dari dunia internasional terhadap kemerdekaannya, secara langsung menempatkan posisinya untuk terlibat dan mengambil bagian dalam komunitas ASEAN. Langkah awal yang ditempuh yaitu dengan berpartisipasi dalam rapat dengan negara-negara yang bernaung dalam wadah ASEAN sebagai pengamat. Setelah mendapatkan status pengamat dalam ASEAN pada tahun 2002, Timor Leste telah mempercepat usahanya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mapan untuk mengisi pada pos-pos yang di perlukan untuk berpartisipasi dalam organisasi ASEAN.

Tahun 2005 Timor Leste telah bergabung dengan *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan pada tahun 2007 menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Langkah ini menunjukkan makna bagi kepentingan Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Timor Leste memiliki hubungan diplomasi dengan 10 negara ASEAN. Kini Timor Leste telah membuka kantor perwakilan di Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, dan Bangkok. Kedutaan besar Timor Leste di Bangkok juga menangani hubungan dengan Kamboja dan Laos, sedangkan di Kuala Lumpur juga menangani hubungan dengan Myanmar dan Vietnam. Selanjutnya, dengan

membentuk hubungan diplomatis di 10 negara-negara anggota ASEAN dan membuka Sekretaris ASEAN nasional di ibu kota negara, Dili, di tahun 2009. Timor Leste juga menghadiri sejumlah pertemuan ASEAN untuk melengkapi kesiapan dan membangun kapasitasnya. Usaha seriusnya dalam memasuki kancah keanggotaan ASEAN ditandai saat Timor Leste akhirnya mengajukan permohonannya secara formal pada 04 Maret 2011. Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan kedaulatan dan komitmen akan keinginan Timor Leste untuk bekerjasama dengan ASEAN.

3. Hasil Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-19

Berdasarkan aturan keanggotaan, sebuah negara yang mengajukan diri menjadi anggota akan dipelajari dan dibicarakan dalam sebuah pertemuan antara semua negara anggota yang selanjutnya akan diputuskan.

Sebagai negara baru, Timor Leste menghadapi berbagai tantangan internal dalam pembangunannya. Aspek sosial, ekonomi, politik, keamanan dan penegakan hukum di Timor Leste masih menjadi pekerjaan rumah sebagai negara baru. Selama 5 tahun pertama kemerdekaan, Timor-Leste masih menghadapi berbagai "*turbulensi*" secara terus menerus dan capaian pembangunan dapat dikatakan relatif rendah, terutama dengan meningkatnya jumlah

penduduk miskin dan berbagai gangguan keamanan akibat konflik horisontal. Pendapatan negara dari minyak bumi dan gas menjadi sumber utama pembiayaan belanja Pemerintah Timor-Leste. Selain itu, krisis politik di tahun 2006 telah berdampak pada kontraksi ekonomi Timor Leste.

Melihat realita dari perkembangan negara baru (Timor Leste) membuat negara anggota ASEAN (Singapura) menyarankan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk meninjau kembali penerimaan keanggotaan Timor Leste. Singapura setuju akan keanggotaan Timor Leste di ASEAN, tapi keberatan dengan keanggotaan awal, Singapura beranggapan bahwa Timor Leste belum siap menyerap tantangan dan kompleksitas di lingkungan ASEAN, terlebih upaya ASEAN mencanangkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

Menyimak sikap dan posisi Singapura diatas, pada KTT ke-18 ASEAN, para pemimpin ASEAN menugaskan Menteri Luar Negerinya masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Dewan Koordinasi ASEAN untuk membahas secara khusus keanggotaan Timor Leste di ASEAN pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-19 pada tanggal 16 November 2011 di Bali. Sejalan dengan rekomendasi tersebut, pada

dasarnya, pertemuan Dewan koordinasi ASEAN menyambut baik keinginan dan permohonan resmi Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN, selain itu telah disepakati pembahasan awal pembentukan *Working Group of the ASEAN Coordinating Council* (WG ACC). WG ACC akan melakukan tugas untuk mengkaji proses keanggotaan dengan memperhatikan modalitas dan saat yang tepat bagi Timor Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN.

Meskipun Timor Leste telah menunjukkan usahanya melalui beberapa proses agar dapat tercatat sebagai negara anggota ASEAN, tidak berarti bahwa pengakuannya secara instan dapat disetujui oleh ASEAN. Hal ini berkaitan dengan masalah politik dan keamanan serta persoalan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste yang menjadi pertanyaan bagi negara anggota ASEAN terhadap kesiapan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas di saat bergabung dengan ASEAN.

BAB III

INSTABILITAS POLITIK KEAMANAN TIMOR LESTE

A. Kondisi Politik Keamanan Timor Leste

Sebagai sebuah negara baru, *Republica Democratica de Timor Leste* (RDTL) menghadapi berbagai tantangan

multidimensi yang hampir tidak dapat dihindari dalam masa transisinya. Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi telah mencederai dan berdampak pada masa depan penerapan makna demokrasi di negara baru ini.

Berawal dari pertentangan ideologi dan politik yang terjadi pada tahun 1980an dan 1990an yang belum terselesaikan, terutama antara para anggota *Comite Central Fretilin* dengan Xanana Gusmao, yang pada saat itu menjabat Komandan Pasukan Gerilya *Forças Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste* (FALINTIL)¹, terbawa hingga ke dalam pemerintahan paska konflik.

Enam bulan setelah penyerahan kedaulatan penuh oleh UNTAET (*United Nation Transition in East Timor*) kepada pemerintah baru Timor Leste pada 20 Mei 2002, negara ini diterpa aksi kekerasan yang mengakibatkan instabilitas politik keamanan di Timor Leste. Kekerasan berawal dari aksi para siswa Sekolah Menengah Atas yang memprotes tindakan aparat kepolisian menangkap teman mereka. Tindakan kepolisian yang anarkis dengan mengancam dan menembak aksi demonstrasi para siswa,

¹FALINTIL- (*Forças Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste*) dibentuk pada 20 Agustus 1975. Awalnya merupakan sayap militer FRETILIN, tapi kemudian berdiri sendiri dibawah pimpinan Xanana Gusmao tahun 1987 dan secara resmi menjadi Angkatan Bersenjata Timor-Leste pada Februari 2001.

membuat mereka bertindak lebih brutal setelah mendapat dukungan dari masyarakat. Akibatnya, para demonstran melampiaskan amarahnya dengan merusak dan membakar toko-toko, fasilitas kepolisian dan rumah Perdana Menteri. Selain itu, dua kejadian lain yang menyangkut gangguan keamanan dalam negeri Timor Leste terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2003, di Atsabe (Distrik Ermera) dan Atabae (Distrik Bobonaro), kedua daerah tersebut dekat dengan perbatasan Indonesia. Pada kedua kasus ini merupakan kelompok sipil bersenjata yang menyerang penduduk lokal yang mengakibatkan korban jiwa.

Isu lain yang memiliki potensi ancaman serius bagi stabilitas politik keamanan di Timor Leste adalah perbedaan suku (*Lorosa'e* dan *Loromonu*)² yang mengarah pada konflik internal. Selama periode ini, konflik antar suku terus merajalela hingga pada kedua institusi keamanan negara. Pada 25 Mei, *Policia Nacional de Timor Leste* (PNTL) dan F-FDTL terlibat dalam tembak-menembak di suatu di pusat kota Dili dan distribusi senjata

²Kata *Lorosa'e* bermakna (Matahari Terbit). Sebutan ini ditujukan kepada wilayah Timor Leste bagian Timur. Sedangkan *Loromonu* mempunyai arti (Matahari Terbenam) yang merujuk kepada wilayah Timor Leste bagian Barat. Sebagian besar anggota F-FDTL terdiri dari orang bagian Timur (*Lorosa'e*), dan para pemohon petisi adalah orang bagian Barat (*Loromonu*).

kepada pihak sipil semakin memperparah situasi keamanan negara.

Konflik di Timor Leste mencapai titik kulminasi pada tanggal 11 Februari 2008, ketika Presiden Ramos Horta ditembak dan terluka parah dalam serangan bersenjata yang dipimpin oleh Alfredo Reinado³ (Kepala Polisi Militer, yang ditangkap karena terlibat dalam kerusuhan bulan April-Mei, dan melarikan diri dari penjara pada tanggal 30 Agustus 2006), Alfredo Reinado tewas dalam serangan itu. Sedangkan, Perdana Menteri Xanana Gusmao lolos dari penyerangan yang dilakukan oleh kelompok tentara pemohon petisi dalam konvoinya. Perdana Menteri tidak terluka dalam serangan tersebut.

B. Instabilitas Politik Keamanan dan Hambatan Keanggotaan Timor Leste Bersama ASEAN

Kerjasama regional ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan kedepan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara garis besar, pencapaian Komunitas ASEAN 2015 terbagi menjadi tiga pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security*

³ Alfredo Reinado adalah seorang kepala Polisi Militer yang berasal dari bagian *Loromonu*, ikut keluar dari markas F-FDTL dan kemudian bergabung bersama dengan para pemohon petisi.

Community/APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ ASCC*). Visi ASEAN ialah "*ASEAN as a concert of Southeast Asian Nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring society*".

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 didasarkan salah satu pilarnya yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN bertujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, telah ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen: *Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building*, dan *Implementing Mechanism*. Rencana Aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam Program Aksi Vientiane (*Vientiane Action Programme/VAP*) yang ditandatangani para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke-10

ASEAN. VAP merupakan acuan pencapaian Komunitas ASEAN untuk kurun waktu 2004-2010.

Pembentukan APSC, menandakan ASEAN selangkah lebih maju dalam menghadapi berbagai ancaman baru yang muncul di dunia internasional. Perkembangan dalam kerjasama politik dan keamanan ASEAN merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan dan membangun modalitas ASC terutama pencegahan dan penyelesaian konflik yang ada di ASEAN sendiri.

Secara umum, situasi politik keamanan di Timor Leste saat ini sedang mengalami kondisi yang relatif lebih kondusif dan stabil. Adanya sebuah konsensus yang semakin meningkat mengenai apa yang dibutuhkan bagi penyelesaian krisis politik, termasuk reformasi sektor keamanan. Pertemuan *Maubisse I* dan *II*⁴, dipelopori oleh Uskup Diosis Baucau, Dom. Basilio do Nascimento dan Presiden Ramos Horta, dengan melibatkan para pemimpin partai politik bertujuan untuk mencari solusi bersama demi terciptanya perdamaian dan stabilitas dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Parlemen pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan kemajuan positif bagi terciptanya suasana demokratis dan aman di Timor Leste.

⁴*Maubisse* merupakan sebuah kota di distrik Ainaro-Timor Leste. Penggunaan istilah *Inkontru Maubisse I no II*, karena pertemuan tersebut diadakan di kota Maubisse.

Meskipun demikian, stabilitas politik keamanan dalam jangka panjang menjadi agenda utama yang tetap dipertanyakan. Selain itu, adanya persepsi terkait ketidakstabilan politik dan keamanan akan turut serta mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terkait dengan catatan sejarah yang mengindikasikan selama Sepuluh tahun setelah kemerdekaannya di tahun 2002, Timor Leste sebagai negara baru terus diterpa permasalahan internal yang mengancam keamanan serta menghancurkan *image* sebagai negara demokratis.

Mencermati dinamika politik keamanan di Timor leste saat ini yang dikategorikan masih muda dan rapuh dalam lembaga-lembaga pemerintahan serta sangat rentan terhadap konflik, dikhawatirkan akan berpotensi menghambat upaya dan target perwujudan Komunitas ASEAN 2015, khususnya pada pilar Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian negara-negara di kawasan dan perdamaian di dunia secara luas dalam lingkungan yang demokratis, adil dan harmonis, tentunya menjadi pertimbangan serius bagi negara anggota ASEAN untuk menerima keanggotaan Timor Leste saat ini.

BAB IV

PERSOALAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Permasalahan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia

Salah satu persoalan yang menghambat konsensus ASEAN untuk keanggotaan penuh Timor Leste adalah permasalahan ekonomi atau keterbatasan finansial dan sumber daya manusianya. Ketika disetujui sebagai anggota baru ASEAN, Timor Leste tidak hanya mengadopsi norma dasar, tujuan dan kebijakan ASEAN, melainkan Timor Leste memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan-aturannya. Negara anggota ASEAN (Singapura), dalam beberapa kesempatan menyatakan keberatan tentang kesiapan Timor Leste dalam mengimplementasikan tanggung jawab, khususnya terkait pada sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Sebagai negara baru dengan begitu kompleksnya permasalahan internal yang dihadapi, menjadikan negara donor sebagai solusi untuk membantu perkembangan ekonominya. Laporan *Non-Governmental Organization* (NGOs) dan media mengklaim bahwa dekade antara 1999-2009, Timor Leste menerima antara USD 5.2 dan 8.8 milyar, merupakan salah satu negara dalam penerima

bantuan internasional di dunia. Meskipun bebas hutang, ketergantungan terhadap bantuan negara donor juga menimbulkan konsekuensi serius suatu negara. Pertanyaan mengenai kedaulatan negara kerap kali mencuat, termasuk kedaulatan perekonomiannya.

Pendapatan dari minyak dan gas (Migas) yang akan memperbaiki kehidupan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja, membangkitkan ekonomi lokal, dan menarik para investor menjadikan harapan bagi pemerintah dan masyarakat Timor Leste. Dalam jangka pendek, upaya pemerintah dalam proyek pembangunan jaringan pipa bawah laut dari ladang *Greater Sunrise* ke daratan Timor Leste diperkirakan dapat merubah kemiskinan menjadi kemakmuran. Akan tetapi, sumber daya manusia yang terbatas menjadi hambatan bagi pemerintah, karena dibutuhkan pekerja yang mapan dengan tingkat keahlian teknis dan ketrampilan khusus yang saat ini belum tersedia. Ketergantungan terhadap pendapatan (90% dari *Gross Domestic Product* dan 95% pendapatan pemerintah berasal dari migas), sedangkan pendapatan negara lainnya relatif kecil dan tidak mempunyai peran sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Ketergantungan pembangunan yang sangat tinggi terhadap penerimaan ekspor minyak dan gas menjadi alasan munculnya

kerentanan bagi sebagian besar rakyat Timor Leste. Hal ini didasari bahwa bahwa minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Indikasi lain yang menjadi sorotan yaitu terkait dengan beragamnya pertemuan dalam kerjasama regional ASEAN. Berdasarkan pertimbangan bahwa setiap tahunnya organisasi ASEAN melakukan pertemuan tidak kurang dari 620 pertemuan tingkat hubungan luar negeri, agrikultur, dan pertukaran budaya. Menghadiri 620 pertemuan ASEAN per tahun, tentunya akan membutuhkan pengeluaran keuangan yang besar bagi negara yang masih berjuang membenahi kerusakan dan menetapkan infrastruktur dasar. Sebagai anggota ASEAN, Timor Leste juga akan diharapkan untuk menjadi tuan rumah beberapa pertemuan yang bergantung pada kepentingan mereka, yang mana memerlukan biaya jutaan dollar untuk membenahi fasilitas konferensi. Selain itu, kondisi ini tidak hanya sebatas pemenuhan keuangan semata, namun juga menekankan pada sumber daya manusia yang sangat terbatas. Kementerian Luar Negeri saat ini mempekerjakan setidaknya 85 orang, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dan jumlah ini hanya 55 orang diplomat.

Laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) terkait perbandingan indeks pembangunan manusia antara negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste melalui *Human Development Report 2011*, dapat dirujuk pada tabel berikut:

Tabel 1

Indeks Pembangunan Manusia antara negara anggota ASEAN dan Timor Leste

HDI rank		Human Development Index (HDI)	Life expectancy at birth (years)	Mean years of schooling (years)	Expected years of schooling (years)	Gross national income (GNI)			
						Value	per capita (constant 2005 PPP \$)	rank minus HDI rank	income rank
						2011	2011	2011	
VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT									
26	Singapore	0.866	81.1	8.8 ^b	14,4 ^B	52,569	-22	0.851	
33	Brunei Darussalam	0.838	78.0	8.6	14.1	45,753	-25	0.819	
HIGH HUMAN DEVELOPMENT									
61	Malaysia	0.761	74.2	9.5	12.6	13,685	-5	0.790	
MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT									
103	Thailand	0.682	74.1	6.6	12.3	7,694	-14	0.714	
112	Philippines	0.644	68.7	8.9 ^b	11.9	3,478	11	0.725	
124	Indonesia	0.617	69.4	5.8	13.2	3,716	-2	0.674	
128	Viet Nam	0.593	75.2	5.5	10.4	2,805	8	0.662	
138	Lao People's Democratic Republic	0.524	67.5	4.6	9.2	2,242	4	0.569	
139	Cambodia	0.523	63.1	5.8	9.8	1,848	11	0.584	
LOW HUMAN DEVELOPMENT									
147	Timor-Leste	0.495	62.5	2.8 ⁱ	11.2	3,005	-14	0.499	
149	Myanmar	0.483	65.2	4.0	9.2	1,535	7	0.536	

Sumber: United Nations Development Programme (UNDP), diakses dari http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Tables.pdf, pada tanggal 24 Mei 2012.

Esensi pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk peningkatan kualitas manusia yang dilihat dari berbagai dimensi. Berdasarkan pada indeks Pembangunan Manusia pada tabel diatas, menunjukkan bahwa peringkat kesejahteraan Timor Leste berada pada urutan 147 dari 187 negara. Dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, peringkat Timor Leste jauh tertinggal dan berada bersama Myanmar pada golongan rendah (*Low Human Development*).

B. Persoalan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia dan Hambatan Keanggotaan Timor Leste Bersama ASEAN

sejauh ini, negara anggota ASEAN memperlihatkan perbedaan pandangan terkait pengakuannya terhadap keanggotaan baru Timor Leste di ASEAN. Meskipun belum ada konsensus diantara negara-negara anggota ASEAN, namun ASEAN, misalnya Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN telah memberikan dukungannya bagi Timor Leste untuk bergabung dalam organisasi regional ASEAN. Nampaknya terdapat kewajiban moral bagi Indonesia untuk mendukung Timor Leste yang merupakan bekas negara kolonialnya sebagai kompensasi untuk perlakuan tragis yang dituding sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang terjadi

sebelum dan selama masa krisis di tahun 1999. Selain itu, Timor Leste juga mendapatkan dukungan dari negara anggota ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Kamboja. Akan tetapi, pandangan bertolak belakang diperlihatkan negara anggota ASEAN, khususnya Singapura. Singapura beranggapan bahwa Timor Leste belum siap menyerap tantangan dan kompleksitas di lingkungan ASEAN, terlebih upaya ASEAN mencanangkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Singapura berpandangan bahwa masuknya Timor Leste di ASEAN saat ini dapat menggagalkan implementasi Komunitas ASEAN, khususnya *ASEAN Economic Community* (AEC).

Melihat keterbatasan ekonomi dan finansial serta sumber daya manusia diatas, tantangan yang dihadapi Timor Leste apabila menjadi anggota penuh di ASEAN, tidak saja mematuhi instrumen hukum dan implementasi prinsip dasar dan tujuan ASEAN. Akan tetapi, ASEAN mensyaratkan persiapan dan peningkatan institusi internal untuk menyambut pembentukan Komunitas ASEAN yang dicanangkan pada tahun 2015.

Deklarasi KTT ke-12 ASEAN di Cebu pada Januari 2007, terkait pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, mencanangkan suatu kawasan ASEAN yang lebih stabil,

sejahtera dan kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi, aliran modal, dan tenaga kerja. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi. Implementasi segenap komitmen tersebut tentunya membutuhkan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan dan penguatan institusi serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan keterbatasan finansial, sumber daya manusia, dan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah menimbulkan keraguan yang kuat untuk menerima keanggotaan awal Timor Leste di ASEAN. Hal ini berpotensi mengarah pada satu tahap kemunduran ketika ASEAN sedang bergerak menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

Mengacu pada uraian diatas, keberatan Singapura bukan tanpa alasan. Mempertimbangkan perkembangan ekonomi Timor Leste yang dikategorikan rendah dipersepsikan dapat menghambat visi ASEAN. Keyakinan

ini didasarkan bahwa penambahan negara baru (Timor Leste) yang lebih miskin akan memperlambat upaya ASEAN mencapai pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Selain itu, Timor Leste juga akan diminta untuk meninjau kebijakan ekonominya dan kesiapan sumber daya manusia. Berdasarkan asumsi tersebut, dalam beberapa kesempatan sebelum KTT, Singapura menyatakan bahwa penerimaan Timor Leste sebagai anggota sebaiknya dilakukan setelah Komunitas ASEAN terbentuk pada 2015. Lebih jauh, Singapura memberikan satu lagi opsi yaitu penerimaan Timor Leste setelah permasalahan Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam telah mapan.

Berdasarkan posisi ini, Timor Leste masih dihadapkan pada fakta bahwa bagaimana dapat meyakinkan negara anggota ASEAN untuk memberikan konsensusnya. Hal ini berkaitan dengan Pasal 6, ayat 3, yang menyatakan penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Tentunya, kondisi ini akan menjadi hambatan dan tugas besar bagi Pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Luar Negaranya berkaitan dengan harapan dan

keinginannya bergabung bersama organisasi kerjasama regional ASEAN.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah dijabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan situasi paska Perang Dingin telah memperluas spektrum pilihan kebijakan baru bagi ASEAN menuju suatu Asia Tenggara yang lebih solid dan independen. ASEAN sebagai suatu entitas organisasi regional di kawasan Asia Tenggara secara kolektif telah mencapai kemajuan yang signifikan melalui beberapa kerjasamanya di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya yang berkembang dan bertransformasi menjadi salah satu organisasi regional yang paling berhasil di dunia.

Bagi Timor Leste, ASEAN mempunyai makna penting dan menjadi potensi strategis dalam kerjasama regional. Keinginan Timor Leste untuk bergabung bersama ASEAN mengindikasikan bahwa posisi ASEAN semakin solid dalam memainkan kiprahnya melalui kerjasama regional. Dengan menjadi bagian dari anggota ASEAN, tentunya Timor Leste akan mendapatkan kesempatan yang luas bagi

kontribusinya terhadap perdamaian baik regional maupun dunia serta berpeluang dalam pergaulan internasionalnya. Asumsinya bahwa sebagai sebuah negara baru dan menyadari akan keterbatasan yang ada, penting bagi Timor Leste untuk mengambil bagian dalam organisasi regional ASEAN.

Namun, negara anggota ASEAN sejauh ini menunjukkan perbedaan pandangannya terkait konsensusnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan terkait hambatan Timor Leste mendapatkan status keanggotaan penuh ASEAN didasarkan pada permasalahan politik keamanan dan persoalan ekonomi dan sumber daya manusia Timor Leste.

Terkait permasalahan politik keamanan, negara baru Timor Leste dianggap sangat rentan terhadap konflik dan aksi kekerasan akibat pertentangan elit politik nasional. Sejarah mencatat bahwa sejak kemerdekaannya pada tahun 2002, eskalasi konflik di Timor Leste terus meningkat sampai pada penyerangan terhadap pemimpin nasional Timor Leste yaitu Perdana Menteri, Xanana Gusmao dan penembakan terhadap Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta pada insiden 11 Februari 2008. Selain itu, Timor Leste juga masih menghadapi persoalan ekonomi dan sumber daya manusianya. Pemikiran ini

didasarkan pada pembangunan ekonomi Timor Leste yang tergolong rendah dan kesiapan sumber daya manusia yang saat ini masih terbatas, sehingga dianggap dapat menghambat pencaanangan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Hal ini merupakan salah satu perhatian dan pertimbangan bagi negara anggota ASEAN untuk memberikan pengakuannya (konsensus) terkait keinginan Timor Leste bergabung dengan ASEAN.

Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan sisi geografis, strategis maupun ekonomi, keanggotaan Timor Leste di ASEAN merupakan salah satu bagian penting di kawasan Asia Tenggara. Upaya perdagangannya dengan anggota ASEAN tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi Timor Leste semata, melainkan juga akan berkontribusi bagi ASEAN. Instabilitas politik keamanan dan ekonomi di Timor Leste akan berdampak secara negatif terhadap tujuan yang dicanangkan ASEAN, yaitu perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, hanya masalah waktu negara anggota ASEAN akan memberikan pengakuannya terhadap keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Persoalan politik keamanan domestik, perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, kelak tidak menjadi hambatan yang merintangangi konsensusnya. Argumen ini didasarkan pada

kenyataan bahwa ASEAN memiliki pengalaman serupa ketika menerima negara-negara anggota ASEAN (CLMV) yang rentan terhadap masalah politik keamanan dan ekonomi dalam negerinya yang diklasifikasikan sebagai negara termiskin didunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

CPF. Luhulima (et.al), *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Cetakan I, Pustaka Pelajar dengan P2P-LIPI, Jakarta, Juli 2008.

Ganewati Wuryandari (et.al.), *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*, Pustaka Pelajar Bekerjasama P2P-LIPI, Yogyakarta, 2009.

Nuraeini S (et.al), *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Agustus 2010.

Sjamsumar Dam & Riswandi, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

B. Internet

"ASEAN Ba Timor Leste", diakses dari http://www.parlamento.tl/docs/Publicasaun/Jornal/E_DISAUN%20I.pdf, pada tanggal 11 Juli 2012.

"ASEAN Needs Timor-Leste", diakses dari <http://the-diplomat.com/asean-beat/2011/06/06/asean-needs-timor-leste/>, pada tanggal 10 Maret 2012.

"ASEAN Vision 2020", diakses dari <http://www.aseansec.org/1814.htm>, pada tanggal 30 Maret 2012.

"Constituição da República Democrática de Timor-Leste", diakses dari <http://www.tl.undp.org/undp/procurementrules/CONST>

ITUTION%20BOOK%20PRINTING%20JUSTICE%20PROJECT.pdf,
pada tanggal 10 Januari 2012.

"Dana Perminyakan Timor Leste", diakses dari
<http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2007/Mar/LHBv8n1Ins.pdf>, pada tanggal 20 Desember 2011.

"Deciphering the Stalled Timor Leste's Membership Bid",
diakses dari
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/20/deciphering-stalled-timor-leste-s-membership-bid.html>,
pada tanggal 20 Juni 2012.

"Diskursu husi José Ramos-Horta iha aniversariu ba dala
36, Proklamasun Independensia RDTL, 28 Novembru
2011", diakses dari
<http://presidenttimorleste.tl/pt-br/2011/12/liatatin-husi-h-e-dr-jose-ramos-horta-ih-komemorasaun-loron-proklamasun-ukun/>,
pada tanggal 24 April 2012.

"East Timor Country Brief", diakses dari
http://www.dfat.gov.au/geo/east_timor/east_timor_brief.html, pada tanggal 10 Mei 2012.

"Embassy's Profile", diakses dari
<http://www.kbridili.com/embassysprofile.htm>, pada
tanggal 04 Februari 2012.

Francisco Lemos Dos Santos, "What Opportunities and
Challenges does Timor-Leste Face in Pursuing
Membership of ASEAN? Are the Opportunities
Sufficiently Promising to Outweigh the
Challenges?", diakses dari <http://www.disis-tl.org/wp-content/uploads/2012/03/BRIEFING-PAPER24.pdf>, pada tanggal 24 Mei 2012.

Ganewati Wuryandari, "ASEAN dan Tantangan Kerjasama di
bidang politik", diakses dari

elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/.../1681.pdf - , pada tanggal 01 Maret 2012.

Ganewati Wuryandari, "East Timor's Membership in ASEAN: Prospects and Challenges", diakses dari *http://www.aseancenter.org.tw/upload/files/OUTLOOK_03_02.pdf*, pada tanggal 01 Maret 2012.

"Hasil-Hasil Penting Keketuaan RI Disepakati", diakses dari *http://news.detik.com/read/2012/01/13/183031/1815222/10/hasil-hasil-penting-keketuaan-ri-disepakati?nd992203605*, pada tanggal 24 Maret 2012.

"Hasil Pertemuan Ke-9 Dewan Koordinasi ASEAN, Bali, Indonesia, 16 November 2011", diakses dari *http://asean2011.kemlu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=437&lang=in*, pada tanggal 24 Maret 2011.

Hernani Coelho, "ASEAN", diakses dari *http://www.presidencia.tl/mag/mag2/pdf/pg42.pdf*, pada tanggal 23 April 2012.

"Inkontru Maubisse II, Hamutuk Buka Konsensu Elisaun 2012", diakses dari *http://suara-timor-lorosae.com/berita-6350-inkontru-maubisse-ii-hamutuk-buka-konsensu-elisaun-2012.html*, pada tanggal 04 Mei 2012.

"Keanggotaan Timor Leste Tunggu Tahapan konsensus Anggota ASEAN", diakses dari *http://www.aseancommunityindonesia.org/component/content/article/50-asean-news/571-keanggotaan-timor-leste-tunggu-tahapan-konsensus-anggota-asean.html*, pada tanggal 20 Januari 2012.

"Kerjasama Ekonomi ASEAN", diakses dari *http://www.aseancommunityindonesia.org/agriculture/55-*

kerjasama-ekonomi -asean. html, pada tanggal 05 Maret 2012.

"Komunikado Ba Imperensa", diakses dari [http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/03/Komunicadu-ba-Imprensa - Sorumutu-Konsellu-Ministrus -16.03.2011.pdf](http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/03/Komunicadu-ba-Imprensa-Sorumutu-Konsellu-Ministrus-16.03.2011.pdf), pada tanggal 27 April 2012.

Megawati Wijaya, "East Timor's Push for an ASEAN-11", diakses dari http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/ME06Ae01.html, pada tanggal 10 Mei 2012.

"Menganalisis Bantuan Australia Kepada Timor Leste", diakses dari <http://www.etan.org/lh/pdfs/bulletin/lhbl3n8bh.pdf>, 18 Desember 2011.

"Menlu ASEAN Bahas Permohonan Keanggotaan Timor Leste", diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/284873/menlu-asean-bahas-permohonan-keanggotaan-timor-leste>, pada tanggal 24 Maret 2012.

"Menyelesaikan Krisis di Timor-Leste", diakses dari http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/timor-leste/120-resolving-timor-lestes-crisis.aspx?alt_lang=id, pada tanggal 07 Mei 2012.

"Piagam ASEAN", diakses dari <http://www.asean.org/AC-Indonesia.pdf>, pada tanggal 10 Oktober 2011.

"Preparasaun TL tama ASEAN, Tenki iha Koperasaun Interna ho Komunitade ASEAN", diakses dari <http://suara-timor-lorosae.com/berita-4002-preparasaun-tl-tama-asean-tenki-ih-koperasaun-interna-ho-komunitade-asean.html>, 10 Maret 2012.

"Siapa Yang Menjegal Langkah Timor Leste" diakses dari <http://lampung.tribunnews.com/2011/05/25/siapa-yang-menjegal-langkah-timor-leste> , pada tanggal 03 Januari 2012.

"Sunrise LNG in Timor-Leste: Dreams, Realities and Challenges" diakses dari <http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/LNGReport.pdf> , pada tanggal 20 Desember 2011.

"Timor Leste", diakses dari <http://indonesian.cri.cn/1/2006/09/12/1@49878.htm> , pada tanggal 30 Januari 2012.

"Timor Leste Menatap Masa Depan", diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120316_timor_analysis.shtml , pada tanggal 21 Maret 2012.

"Timor Leste Siap Gabung ASEAN", diakses dari <http://matanews.com/2009/02/04/timor-leste-siap-gabung-asean/> , pada tanggal 19 Januari 2012.

"UNMISSET dan Keamanan Dalam Negeri Timor Leste", diakses dari <http://www.etan.org/lh/pdfs/bulv4n2bh.pdf> , pada tanggal 04 Mei 2012.

"Vientiane Action Programme", diakses dari <http://www.aseansec.org/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf> , pada tanggal 30 maret 2012.